

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan yang biasanya disebut dengan otonomi desa, dalam perjalanan Ketatatanegaraan Republik Indonesia desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerinthana dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu desa merupakan faktor kekuatan utama sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.¹

Desa Tirta Mulya sedang melaksanakan pembuatan dan pembangunan embung melalui Program Pilot Project Pembangunan Embung Desa di tengah masyarakat Kabupaten Bungo mengingat besarnya manfaat embung tersebut bagi masyarakat Desa Embung ini diberi nama "Agrowisata atau Wisata Desa".

¹ Muhammad Frid Ma'ruf "*peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata*", Volume 10 Nomor 2, Tahun 2022, 17-30

Diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan embung melalui dana Anggaran pendapatan dan belanja Negara Direktorat Jendral Pemberdayaan dan pembangunan usaha masyarakat membangun desa Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2018 dapat menjadi pembangunan sarana lainnya melalui swadaya masyarakat maupun dana lainnya yang berada di desa.²

Agrowisata Desa Tirta Mulya dalam targetnya mengintegrasikan aspek pertanian, ekonomi, para petani dan pendidikan, yang sesuai dengan arah kebijakan desa yaitu inovasi pertanian dan edukasi. Untuk mewujudkan Agrowisata Desa Tirta Mulya, diperlukan perencanaan yang matang, saat ini telah dirancang rencana strategis tahapan pelaksanaan berdasarkan kurun waktu, yang telah dimulai Tahun 2018, dan target sempurna di Tahun 2024, Tahun 2018 sampai 2019 diantaranya dilaksanakan observasi dan penyusunan masterplan serta peluang investasi, Tahun 2020 sampai 2021 pembangunan sarana pokok, integrasi potensi dan peluang investasi.

Agrowisata Desa Tirta Mulya terbentuk pada Tahun 2018 yang mana salah satu program inisiatif dari Pemerintah Desa yang dituangkan dalam visi dan misi Desa Tirta Mulya, Agrowisata Desa Tirta Mulya memiliki Luas 6 hektar terbagi atas Area diantaranya yaitu³ :

² Profil dan progres badan usaha milik desa (BUMDesa) mulya abadi dusun tirta mulya kecamatan pelepat ilir, kabupaten bungo, tahun 2021. hlm.12

³ *Ibid*.hlm.13

Tabel 1.1
Luas Agrowisata Desa Tirta Mulya

No	Jenis Potensi	Luas
1	Area Embung	40m x 125m
2	Area Kolam Wahana	30m x 80m
3	Area Kolam Ikan	15m x 15m

Sumber: Profil dan Progres Dokumen Tahun 2021

Dan sisa dari Luas Area tersebut akan direncanakan untuk peruntukan Agrowisata Perkebunan yang mana terdiri dari :

Tabel 1.2
Luas sisa Area Agrowisata Perkebunan

No	Jenis Perkebunan	Luas
1	Hortikultura	-+ ¼ HK
2	Kebun bunga	-+ ¼ HK
3	Arena budaya	-+ ¼ HK
4	Mangga	20m x 40m
5	Manggis	20m x 40m
6	Kelapa entok genjah	20m x 20m
7	Jambu air	20m x 40m
8	Kebun durian	20m x 40m

Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi Desa Tirta Mulya memiliki beberapa potensi seperti sebagai berikut :

1. Sektor pertanian
2. Sektor perkebunan (kelapa sawit)

3. Sektor tanaman Hortikultura
4. Sektor peternakan
5. Sektor perdagangan

Rencana pemanfaatan wilayah Agrowisata Desa Tirta Mulya direncanakan sebagai lokasi multi fungsi yaitu, sumber cadangan air pendukung tanaman Hortikultura, sumber cadangan air pendukung sarana pamsimas, pengendali banjir, wisata air, perkebunana sawit, perkebunan durian dan mangga, kolam ikan, edukasi budaya, edukasi pertanian, edukasi perikanan.⁴

Perangkat Indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.⁵

Pasal 3 Angka 3 Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata bahwa : “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.

Pemerintah Desa Mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakasa dan

⁴ *Ibid*.hlm.15

⁵ Mohamad Sukarno, “*Analisis Pembangunan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM)*”, Prosiding Seminar Edusainstech, ISBN :978-602-5614-35-4, FMIPA UNIMUS 2020, hlm. 533-534.

swadaya masyarakat di pedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.⁶

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Pasal 26 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 seorang Kepala Desa memiliki Tugas dan Wewenang yakni :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari penjelasan diatas Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membina kehidupan desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, serta Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Hal ini dapat menjadi sebuah bekal utama kepala desa untuk melakukan pembangunan agrowisata, yang diharapkan dikemudian

⁶ Susi iswanti, zulkarnaini, “*peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata pulau tilan di kepenghuluan rantau bais kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir*”, jurnal Ilmu Administrasi publik Vol. 8, No.1 /2022, hlm. 93.

hari mampu menambah pendapatan desa, dan menjadikan desa yang lebih maju. Sebuah desa memiliki peluang untuk berkembang, namun hal ini idealnya tidak terlepas dari peran penting kepala desa.

Pasal 26 Undang-undang No 6 tahun 2014 mengatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa di laksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat Desa. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut berkerja sama dalam pembangunan itu sendiri.⁷

Dari kewenangan kepala desa dan agrowisata sebenarnya akan menjadikan desa akan jauh lebih mandiri, dan mampu bersaing dengan desa yang lain. Tidak dapat dipungkiri dari sebuah kewenangan Kepala Desa yang dikembangkan melalui agrowisata mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta berkembangnya kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pasal 1 Angka 7 No 6 Tahun 2020 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bungo yang selanjutnya adalah perancang pembangunan kepariwisataan daerah untuk priode lima tahun terhitung sejak tahun 2020-2025. Rencana Induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud meliputi

⁷ *Ibid*.hlm.96

perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pihak Desa melakukan koordinasi dengan dinas pariwisata. Namun, dinas Pariwisata belum bisa memberikan bantuan berupa untuk tempat wisata yang baru saja di buka. Kebijakan dinas pariwisata akan memberikan bantuan untuk wisata yang sudah berjalan 50%, Hal ini dikarenakan pariwisata melakukan pengembangan potensi bukan membangun potensi. Kecuali wisata tersebut dalam lingkup Hak milik dinas pariwisata seutuhnya. Namun pihak desa sudah berkoordinasi dengan pengembangan SHU, dilakukan pihak desa dengan melakukan lobi ke Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan pangan yang mendapatkan bibit buah unggul, Dinas Peternakan Dan Perikanan mendapatkan Bibit Ikan, dan Dinas peridakop untuk mendapatkan Saung UMKM, dan meminta dana dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD kemudian ditambah oleh dana dari Desa.

Kecamatan Pelepat Ilir terletak antara 1010 27' – 1020 30' Bujur Timur dan antara 1,080 – 1,550 Lintang Selatan. Ketinggian wilayah sekitar 72 mdpl dan luas kecamatan 422,7 km².⁸

Desa Tirta Mulya masuk dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Desa dengan empat kampung ini dipimpin oleh seorang kepala desa sekaligus sebagai pemangku adat. Tiap kampung dipimpin oleh Kepala Kampung (Kepala Kewilayahan) dibantu ketua RT. Pusat pemerintahan terletak di Jl. Garuda RT. 05 Kampung II. Desa ini dapat ditempuh selama 76 menit (47 Km) dari ibukota Bungo dan 28menit (17 Km) dari Ibu kota Kecamatan dengan kondisi jalan beraspal.⁹

⁸ CV.Mella Offset, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Kecamatan Pelepat Ilir Dalam Angka 2022, Publikasi. 15090.2204, ISSN. 2714-5379, hlm. 3

⁹ CV.Mella Offset, *op. cit.*, hlm 5

Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, Desa Tirta Mulya memiliki beberapa potensi seperti sektor pertanian sub sektor perkebunan yang menjadi mayoritas atau pokok kegiatan masyarakat (perkebunan kelapa sawit) dan beberapa kegiatan lain seperti sektor tanaman hortikultura dan peternakan, serta Usaha sektor perdagangan akan menjadi sumber pendapatan desa.¹⁰

Secara Administrasi, Luas Desa Tirta Mulya adalah 2419,75 ha yang terdiri dari 4 kampung dan 15 Rukun Tetangga. Luasan ini setara dengan 0,52 persen luas wilayah kabupaten Bungo. Luas wilayah Kabupaten Bungo tercatat 4659 Km.¹¹

Desa Tirta Mulya memiliki Tanah Kas Desa yang luas dan layak untuk dikembangkan, Memiliki SDA dan SDM yang memadai serta di dukung kelembagaan yang kuat Memiliki Keunggulan dibidang Pertanian Dukungan Kebijakan Pemerintah yang berpihak pada ekonomi kreatif dan Pembangunan Wilayah Perdesaan Dengan kondisi itu Tirta mulya Layak dikembangkan untuk sebuah program yang terintegrasi dengan kekuatan dan potensi yang ada serta pelibatan Multi pihak upaya pengembangan agrowisata pedesaan dengan memanfaatkan potensi pertanian serta melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.

Sebagai penunjang relevansi data dan fakta dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap sejati dengan penelitian ini, Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

¹⁰ Profil Dan Progres Badan Usaha Milik Desa Mulya Abadi Dusun Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Tahun 2021, hlm. 2

¹¹ *Ibid* . hlm. 4

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Lestari Cahyani Putri (Mahasiswa Jurusan Urusan Publik Universitas Muhammadiyah Mataram)	Peran Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tahun (2021)	Dari penelitian ini membahas permasalahan tentang rendahnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan Belum berjalan optimal hal ini dijelaskan sebagai berikut: sosialisasi belum berjalan dengan baik, kemudian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta juga masyarakat dalam mengadakan event langsung kampung Bintang Bekapur kepada Wisatawan.
2	Diki Kurniawan (Mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan sosiologi)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Agrowisata Nanas Di Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung”(2022)	Membahas tentang Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. sepanjang tahun 2018 mencatat sebanyak 618.000 orang pengunjung lokal maupun pengunjung luar daerah yang datang berwisata. Kunjungan wisatawan ke Bangka Selatan mengalami peningkatan satu hingga dua persen, sedangkan pada tahun 2017 kunjungan wisatawan hanya mencapai 610.000 orang. Kemudian tahun 2019

			<p>jumlah wisatawan yang datang mengalami penurunan hanya mencapai 303.000 orang. Namun sejak tahun 2020 terjadi penurunan cukup drastis terhadap aktivitas wisata. Tercatat pada bulan juli 2020 angka kunjungan wisatawan hanya sebanyak 77.100 wisatawan saja.</p>
3	Putu danu swastika	<p>Analisis Pengembangan Agrowisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun (2017)</p>	<p>Kebijakan pemerintah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan agrowisata artinya kebijakan pemerintah kurang dapat meningkatkan pengembangan agrowisata dikarenakan kebijakan pemerintah belum optimal dalam hal promosi terhadap obyek agrowisata dan produk pertanian masyarakat lokal. Pemerintah dapat membuat terobosan baru dengan melakukan promosi secara digital yang tidak hanya fokus pada informasi produk pariwisata, tetapi juga terjalin hubungan baik antar pelaku pariwisata dengan wisatawan. <i>Entrepreneurship</i> secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan agrowisata berarti meningkatnya</p>

			<p>kewirausahaan akan meningkatkan pengembangan agrowisata dikarenakan mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam mengembangkan agrowisata. Infrastruktur secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan agrowisata yang berarti meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai meliputi jalan, listrik, air bersih dan telekomunikasi, serta penunjuk arah, papan informasi wisata, rambu lalu lintas wisata</p>
--	--	--	---

Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti, Sebagai berikut :

Penelitian yang diambil sekarang ini fokus membahas permasalahan lebih dalam mengenai identifikasi startegi pemerintah desa dalam pengembangan dan pembangunan suatu kawasan agrowisata dari ruang lingkup permasalahannya, kendalanya, penyediaan sarana prasarana, regulasi, aspek tata kelolanya yang nanti dapat dimanfaatkan oleh pengunjung wisata dan masyarakat menjadi kawasan eduwisata dan dapat dikembangkan dengan baik.

Dari ketiga penelitian diatas ketiganya sama-sama membahas tentang bagaimana peranan pemerintah dalam suatu pengembangan Agrowisata, namun dari masing-masing penelitian terdahulu membahas ruang lingkup permasalahan yang berbeda-beda. Dari penelitian pertama Lestari Cahyani Putri membahas ruang lingkup permasalahannya tentang peningkatan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Soro, dengan tujuan

untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Soro dalam meningkatkan potensi pariwisata, strategi Pemerintah Desa Soro dalam meningkatkan potensi pariwisata dan mencari tahu kendala yang menghambat Pemerintah Desa Soro dalam mengembangkan potensi pariwisata., Menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan Wawancara, Observasi Lapangan dan Dokumentasi. Kemudian yang kedua Diki Kusniawan membahas ruang lingkup permasalahannya tentang penyebab utama menurunnya kunjungan wista pada agrowisata nana, dan strategi pemerintah desa dalam pengembangan agrowisata nanas, metode yang digunakan kualitatif dengan strategi deskriptif pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. dan yang ketiga Putu Danu Swastika membahas ruang lingkup permasalahannya tentang kurangnya luas lahan pertanian untuk dijadikan suatu kawasan agrowisata, metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, interview, dan kuesoner.

Peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan masih banyak ditemukan dalam segi pembangunan di Desa Tirta Mulya yang masih dalam tahap pembangunan yang disebabkan oleh, pertama dikarenakan pembangunannya menggunakan dana desa, jadi harus dibangun dengan bertahap sesuai RPJMDES (Rencana pembangunan jangka menengah Desa) dan RKPDES (Rencana kerja Pemerintah Desa), yang kedua belum adanya bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, kemendes padahal proposal sudah sering diajukan, ketiga pada tahun 2020-2022 sama sekali tidak bisa mengeluarkan dana untuk pembangunan agrowisata karena terkendala Covid-19 karena dana desa tersebut diprioritaskan untuk bantuan penanganan Covid. Kemudian mengingat dana pembanguan cukup besar maka pihak pemerintah desa terus mencari solusi atau jalan keluranya dengan cara yang pertama memperbanyak relasi proposal, kedua melalui pembangunan gotong royong.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul *“Analisis Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pembangunan Agrowisata Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo”*

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program pemerintah Desa dalam pelaksanaan potensi pengembangan pembangunan agrowisata yang berada di Desa Tirta Mulya?
2. Seberapa besar pelaksanaan dan manfaat pemerintah Desa dalam pengembangan agrowisata di Desa Tirta Mulya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program pemerintah Desa dalam pelaksanaan potensi pengembangan pembangunan agrowisata di Desa Tirta Mulya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan dan manfaat pemerintah desa dalam pengembangan pengembangan agrowisata di Desa Tirta Mulya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mafaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.
 - b. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar mengetahui terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan stakeholder yang terlibat pada pengembangan desa wisata.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo dalam hal kaitannya pada pengembangan desa wisata.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Himawan S.Pambudi (2003:5) Otonomi Desa merupakan sebuah harapan untuk Desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, Otonomi Desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada Desa dan dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan atas apa yang diusahakan kekuasaan orde baru. Selain itu, gagasan ini memuat pola mengenai kontruksi Desa masa depan, yaitu sebuah bentuk ideal yang hendak dicapai.¹²

Berdasarkan pendapat hermawan dapat ditarik kesimpulan otonomi desa merupakan sebuah gagasan baru yang mampu mengelola pola kesuksesan kontrusi desa di masa depan secara ideal. Kebijakan pengembangan otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kebijakan umum Pembangunan Pemerintah kabupaten/kota, Provinsi dan

¹² Azza hanim, *Konsep Otonomi Desa*, Riau : Jurnal Fisip, Tahun 2020. hlm. 20

Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Pelaksanaan Otonomi Desa berikutan dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah Pasal 1 Angka 1 Bab I UU No 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa:

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan¹³

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

¹³ Zulman barniat, *Konsep Teoritis dan Legal*, Lampung : Jurnal Analisis Sosial Politik, Tahun 2019, hlm. 24

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan cirri-ciri sebagai berikut:¹⁴

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa.
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi didesa adalah rapat desa.
3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

Otonomi Desa adalah sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Makna Otonomi Desa bagi masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat.

Otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan asal- usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa yakni:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

¹⁴ *Ibid.* hlm.29

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APB desa
6. Membin kehidupan masyarakat desa

Pemerintah desa mempunyai peran dalam pengembangan desa wisata. Menurut Blakely (dalam Kuncoro 2004:113-114) peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah Desa dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh Pemerintah Desa untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

2. Regulator

Pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

3. Koordinator

Pemerintah Desa dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan

di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

4. Fasilitator

Pemerintah Desa dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

5. Stimulator

Pemerintah Desa dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha. Dalam bidang kepariwisataan Pemerintah Desa juga dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

1.5.2 Teori Pembangunan Desa

Menurut (Sutoro, 2015) menyatakan bahwa Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat disuatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan

informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam Pasal 78 Angka 1 Bab 9 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa :

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.¹⁵

Pembangunan Desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.¹⁶

Pembangunan Desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotoogroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempersepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaa.

Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki aspek utama yaitu:¹⁷

¹⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT, Pustaka cidesindo, 1996. hlm. 392

¹⁶ *Ibid.* hlm. 393

¹⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018) hal.17

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan demikian, pembangunan Desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

1.5.3 Pengembangan Agrowisata

Agrowisata pada umumnya bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, dan perikanan.¹⁸

Agrowisata merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik berupa potensi pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya salah satu produk wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata bentuk kegiatan yang memanfaatkan mulai dari awal sampai dengan produk pertanian dalam berbagai sistem skala dan bentuk sebagai objek wisata dengan

¹⁸ Ismayanti, *Pengantar pariwisata*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 157.

tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.

Menurut (Jahar, 2008) agrowisata merupakan suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha dibidang pertanian. Selain perkebunan menjadi sektor ekonomi yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, perkebunan juga mampu menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan.

Menurut (Mayasari & Ramdhan, 2013) manfaat dari konsep agrowisata ini antara lain:

1. Sebagai wahana untuk mendiseminasikan berbagai teknologi pertanian kepada masyarakat secara umum.
2. Sebagai kegiatan dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan lingkungan sekitar.
3. Meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
4. Menambah nilai estetika pada lingkungan sekitar.
5. Sebagai wahana edukasi dan merangsang kegiatan ilmiah.

Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu kawasan agrowisata adalah menyangkut daya tarik objek wisata, sarana berwisata dan prasarana berwisata. Obyek agrowisata harus mencerminkan pola pertanian Indonesia baik secara tradisional maupun modern, hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sekitar lokasi wisata dapat disediakan berbagai jenis atraksi wisata atau kegiatan wisata sesuai dengan potensi sumber daya pertanian dan kebudayaan setempat.

Secara garis besar strategi pengembangan agrowisata meliputi beberapa aspek diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan promosi. Sumber daya manusia disini maksudnya adalah dimana pihak pekerja agrowisata memiliki kemampuan untuk mengelola agrowisata dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan

pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengetahuan dan keterampilan bagi para pekerja dalam berkomunikasi dengan wisatawan.

Sumber daya alam merupakan produk utama yang ditonjolkan dalam agrowisata yaitu kealamian atau keasrian lingkungan agrowisata dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan agrowisata, dimana sumber daya alam ini dikelola oleh pekerja agrowisata agar dikemas dengan semenarik mungkin dengan tidak menghilangkan keasrian lingkungan agrowisata sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian wisatawan yang datang.

Kriteria kawasan agrowisata menurut Bappenas adalah sebagai berikut :

- 1 Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro, baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan dan kehutanan.
- 2 Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan dan kebergantungan yang cuup tinggi, antara lain kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang mengacu berkembangnya sektor pertanian.
- 3 Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan, antara lain berbagai kegiatan dan produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Potensi budidaya pertanian yang dapat dikembangkan sebagai agrowisata antara lain :

a. Perkebunan

Suatu kawasan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik agrowisata, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa setiap kegiatan dan proses perusahaan perkebunan dapat dijadikan daya tarik atau atraksi yang menarik bagi wisatawan mulai dari pembibitan, penanaman, pengelolaan ataupun pengepakan hasil produksi.

b. Tanaman pangan dan hortikultura

Daya tarik tanaman pangan dan hortikultura sebagai objek agrowisata antara lain kebun bunga, kebun buah, kebun sayuran, tanaman obat-obatan.

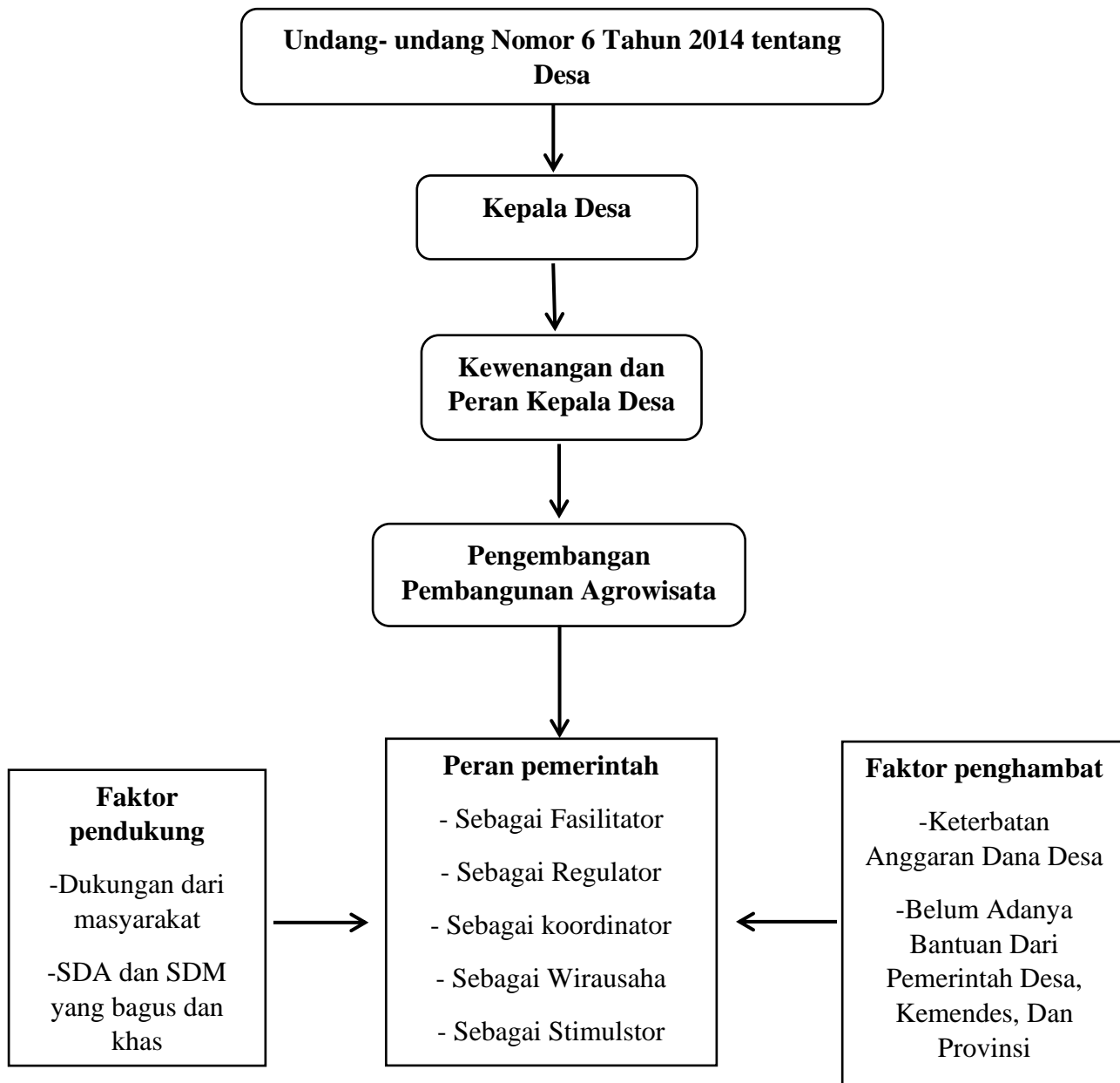
c. Peternakan dan Perikanan

Peternakan sebagai sumber daya wisata antara lain cara tradisional dalam pemeliharaan ternak, produksi ternak. Sedangkan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai obyek agrowisata seperti budidaya ikan air tawar, tempat pemancingan bagi pengunjung wisata.¹⁹

¹⁹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Di Indonesia*, (Denpasar, 2010) h.59.

1.6 Kerang Berfikir

Tabel 1.4 Bagan Kerangka Pikir



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁰

Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulas, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²¹

Sehingga dengan metode ini penelitian dapat menganalisis lebih mendalam terkait dampak pelaksanaan pengembangan pembangunan, dan pengumpulan datanya pasti maksud data pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya bukan hanya data yang sekedar terlihat tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat tersebut.²²

1.7.2 Lokasi penelitian

Lokasi Pembangunan berada pada Tanah Kas Desa terletak di Jalan Merpati RT/RW 03/01 Desa Tirta Mulya Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo. sebelah utara berbatasan dengan desa mangun jayo dan kabupaten tebo, sebelah selatan berbatasan dengan desa maju jaya, sebelah barat berbatsan dengan desa lingga kuamang serta sebelah timur dengan desa embacang gedang.

1.7.3 Fokus penelitian

²⁰ Sugiyono, "*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*". Bandung : PT Alfabet, 2016, hlm. 6

²¹ *Ibid*, hlm. 9

²² *Ibid*, hlm. 13

Fokus penelitian didasarkan untuk membatasi masalah-masalah yang ingin di teliti oleh peneliti, dimana masalah-masalah ini haruslah di dasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fisibilitas masalah. Suatu masalah dikatakan feasible apabila dalam masalah tersebut terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka fokus penelitian ini adalah menganalisis Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pembangunan Agrowisata Di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Yang dimaksud adalah bagaimana perangkat desa khususnya kepala desa bisa meningkatkan pengembangan pembangunan Agrowisata.

1.7.4 Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Dalam menentukan informan dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara, yakni salah satunya menggunakan teknik prosedur purposive yaitu menentukan kelompok yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Purposive sampling digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilainya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya.

Adapun yang menjadi informan dalam peneltitian yaitu :

Tabel 1.5 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Paino	Kepala Desa

2.	Bpk. Beni Riswanto, SI	KASI Pelayanan
3.	Bpk. Depi Yulianto, ST	KASI Pemerintahan

1.7.5 Sumber data

Dalam penelitian kali ini peneliti memilih untuk menggunakan dua sumber data, yakni data sekunder dan data primer.

a. Data primer

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data serta melibatkan pengumpulan faktual, dari tangan pertama pada saat itu dalam suatu proyek penelitian, melalui wawancara/interview, pengukuran langsung, pengamatan percobaan, kuesioner. Informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk investigasi yang sedang dilakukan. Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang terdiri dari beberapa instansi pemerintahan Desa Tirta Mulya yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebuah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari catatan, buku, atau majalah yang datanya sudah diolah.

1.7.6 Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. observasi dalam penelitian ini yaitu untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pengembangan pembangunan agrowisata yang ada di desa tirta mulya kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Orleans Fatchan (2004) mengungkapkan bahwa dalam wawancara peneliti memerlukan informan sebagai individu yang ahli dalam kehidupan dan pengalamannya sendiri, dan pelaksanaannya lebih bersifat dialog.

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian, dimana dokumentasi diperlukan sebagai bukti akurat ketika di lapangan atau saat penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis data

Penulis melakukan analisa data setelah dirasa data-data yang dikumpulkan mencukupi untuk dijadikan bahan penyusunan laporan. Setelah data berhasil dikumpulkan sehingga peneliti kemudian melakukan analisis dan mengorganisasikan setiap informasi serta melakukan klarifikasi terhadap informasi yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman, dalam Fatchan (2004) mengemukakan bahwa analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan alur tahapan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (Verification)²³.

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil observasi, catatan wawancara mendalam, serta hasil dokumentasi.
2. Tahap selanjutnya yaitu reduksi data yang dilakukan dengan merangkum hasil pengumpulan data dan melakukan pengkodean tiap-tiap fokus penelitian yang akan dibahas agar data lebih mudah untuk diolah.
3. Tahap ketiga yaitu penyajian data dimana penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif atau uraian singkat mengenai hasil reduksi data yang telah dilakukan untuk membahas fokus-fokus penelitian yang diteliti, serta tahap yang terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari semua tahapan analisis data.

1.7.8 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016) meliputi, uji kredibilitas data, uji tranferability, uji dependability, dan uji confirmablity. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan tringulasi. Menurut wiliam wiersma (sugiyono, 2016) triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

²³ Miles dan Huberman, “*Qualitative Data Analysis*”, London, t.p.,t.t.

Untuk memperoleh keterpercayaan data, tentunya di perlukan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik untuk menguji keterpercayaan data dengan cara triangulasi.²⁴

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁵

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan tipe Triangulasi Data, tipe triangulasi ini yakni menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian.

²⁴ Samsu, “Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)”, Pusaka Jambi, Jami, 2021, hlm.100

²⁵ Samsu, *op.cit.* hlm.101